

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Survey yang dilakukan oleh Online Computer Library Center (OCLC) Pada tahun 2005 bahwa sebanyak 69% jumlah dari responden mempunyai stigma bahwa perpustakaan hanya sebatas ruang yang memuat buku. Hal tersebut membuahkan sebuah respon negatif terhadap perpustakaan yang semestinya mempunyai misi sebagai sebuah ruang kreatif bagi masyarakat (Johnson, 2016). Berdasarkan pada data OCLC tersebut, diketahui bahwasanya masih banyak pemustaka yang merasa kurang puas dengan layanan yang diberikan oleh perpustakaan. Berdasar pada survey tersebut, perpustakaan masih dapat dikatakan jauh dari perannya sebagai ruang kreatif bagi masyarakat. Ruang kreatif perpustakaan dimaknai sebagai ruang bagi masyarakat untuk dapat belajar secara informal dengan memanfaatkan keberadaan dari perpustakaan (Boyle et al., 2016).

Munculnya stigma masyarakat tentang perpustakaan yang cenderung mengarah kepada stigma negatif, menjadi sebuah dorongan bagi beberapa kalangan untuk membentuk perpustakaan dengan basis komunitas. Perpustakaan berbasis komunitas ini lahir dari beberapa kalangan masyarakat yang memiliki kecintaan lebih dibandingkan kalangan masyarakat lain terhadap dunia pustaka dan memiliki tujuan untuk mengembalikan budaya membaca serta fasilitas bagi masyarakat. Secara harfiah, perpustakaan berbasis komunitas merupakan sebuah ruang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemustakanya dengan menyediakan bahan pustaka (Septiana, 2007). Berbeda dengan perpustakaan yang umum ada di masyarakat, perpustakaan komunitas lebih dikatakan fleksibel dalam hal praktik kerjanya. Ketika perpustakaan formal memiliki aturan baku dan terbatas dengan tembok serta gedung dengan indikator tertentu, perpustakaan berbasis komunitas lebih dibebaskan untuk memilih genre atau gaya dalam praktiknya baik secara sistem, penempatan, pengelola serta

komponen lain sebagai faktor berjalannya sebuah perpustakaan. Tidak adanya sebuah peraturan baku dan skema tertentu yang harus dipenuhi merupakan peluang yang besar bagi perpustakaan komunitas untuk menggaet ketertarikan pemustaka dalam memanfaatkan fasilitas yang ada (Dent, 2006).

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada jurnal Haklev yang berjudul “Factors that Contributed to the Community Library Movement in Indonesia”, jumlah perpustakaan komunitas yang beroperasi di Indonesia yang dikemas dalam bentuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM) berjumlah sekitar kurang lebih 5400 TBM (Håklev, 2010b). jumlah tersebut belum termasuk dengan perpustakaan komunitas yang memiliki bentuk lain dan juga masih banyak perpustakaan komunitas yang beroperasi namun belum masuk kedalam data Haklev ataupun belum begitu dikenal eksistensinya. Faktor menjamurnya perpustakaan komunitas di Indonesia tidak dapat terlepas dari catatan historis Indonesia dimana pada zaman kolonial, masyarakat tidak dapat mengakses bahan pustaka. Bahkan hal itu berlanjut sampai dengan masa pasca kemerdekaan dimana hanya kalangan tertentu yang mempunyai akses perpustakaan dengan mudah. Dalam literatur penelitian yang ditulis Haklev, pergerakan perpustakaan komunitas di Indonesia lahir di Kota Bandung dan Yogyakarta. Eksistensi perpustakaan komunitas dimulai pada kedua kota tersebut karena adanya faktor budaya heterogen yang mendorong lahirnya kalangan-kalangan yang memiliki kepedulian lebih terhadap budaya membaca dan literasi yang mendorong terbentuknya perpustakaan berbasis komunitas.

Hadirnya sebuah perpustakaan komunitas menjadi harapan untuk dapat menjangkau keseluruhan dari lapisan masyarakat. Sejatinya hal tersebut juga untuk dapat mengisi celah-celah yang terdapat pada perpustakaan formal yang eksis di kalangan masyarakat (Johnson, 2016). Seperti halnya sebuah penelitian yang dilakukan pada Perpustakaan umum Kota Malang menyebutkan dimana masih terdapat kekurangan-kekurangan yang signifikan dalam pengelolaan perpustakaan. Beberapa kekurangan tersebut diantaranya adalah sumber daya pengelola yang kurang memadai yang menyebabkan petugas yang ada kelelahan, tidak adanya kotak kritik dan saran

sebagai tolak ukur pengembangan layanan bagi masyarakat, kurangnya bahan koleksi untuk dimanfaatkan oleh pengguna, dan yang paling fatal adalah tidak kesesuaian antara informasi bahan pustaka pada katalog perpustakaan yang mengakibatkan pemustaka akan kesulitan untuk mendapatkan referensi yang diinginkan (Ramadani et al., 2019).

Minimnya kualitas pengelolaan perpustakaan tidak hanya terdapat dalam perpustakaan dengan lingkup wilayah kota, namun bahkan ditemui pada perpustakaan dengan lingkup wilayah desa yang seharusnya dapat lebih menjangkau masyarakat melihat lingkup cakupan masyarakat yang tidak terlalu banyak. Hal tersebut dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan Awalludin pada Perpustakaan Desa Ujungnegero Kabupaten Batang (Awalludin & Ati, 2017). Berdasarkan pada penelitian tersebut masih banyak ditemui permasalahan-permasalahan yang membuat layanan perpustakaan tidak berjalan secara optimal dimana diantaranya permasalahan tersebut meliputi pengelola yang kurang aktif dan minim pengetahuan, pelayanan yang dilakukan tidak konsisten serta preservasi koleksi yang kurang baik. Permasalahan tersebut tentunya tidak serta merta terjadi begitu saja melainkan terdapat sebab-akibat yang mendorong kemunculan masalah tersebut. Penelusuran Awalludin dalam penelitiannya menemukan bahwa permasalahan tersebut muncul akibat dari pustakawan yang kurang aktif dalam mengikuti pembekalan perpustakaan serta disibukan dengan kepentingan pribadinya masing-masing.

Kualitas layanan yang kurang pada suatu perpustakaan akan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan dari pemustaka. Fenomena tentang rendahnya kepuasan pengguna terhadap layanan perpustakaan dapat dilihat pada perpustakaan umum di Barat Daya (Joy & Idowu, 2014). Berdasarkan survey pada penelitian tersebut diketahui sebanyak 42 % responden pengguna perpustakaan memanfaatkan layanan setiap harinya yang menunjukkan bahwasanya memang pemanfaatan pemustaka terhadap perpustakaan menunjukkan tren positif. Namun setelah diberikan pertanyaan mengenai kepuasan, sebanyak 57,2 % dari keseluruhan responden menunjukkan ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan oleh perpustakaan umum. 69,6 %

diantaranya mengatakan bahwa koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan masih kurang memadai atau lebih kepada tidak ada keterbaruan.

Fenomena terkait dengan kepuasan pemustaka yang rendah tidak terlepas dari bagaimana perpustakaan memberlakukan aturan terhadap pemustakanya. Peraturan yang diberlakukan oleh perpustakaan menjadi alat untuk mendisiplinkan pemustaka yang bertindak sebagai pengguna layanan perpustakaan. Pada praktiknya, peraturan yang diberlakukan oleh perpustakaan menjadikan praktik pendisiplinan bagi para penggunanya. Praktik kuasa yang termuat didalam peraturan yang diberlakukan tidak lain adalah untuk membentuk perilaku yang semestinya boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemustaka pada saat mengakses layanan perpustakaan (Ifidon, 1985). Meskipun dalam tindakan peraturan pada perpustakaan berorientasi pada kestabilan dan kedisiplinan, akan tetapi dalam praktiknya justru tidak pasti sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pada penelitian yang dilakukan pada perpustakaan akademis di University of New Hampshire menunjukan bahwa praktik pemberlakuan aturan bertolak belakang dengan beberapa hal yang semestinya dilakukan oleh pemustaka, seperti misalnya pada peraturan diberlakukan kepada pemustaka untuk tidak membawa mesin penghangat, padahal hal tersebut dibutuhkan untuk menunjang sarana belajar (Bresnahan, 2019). Ketidaksesuaian antara kebijakan yang berlaku dengan pemustaka berujung pada munculnya pelanggaran-pelanggaran yang menjadi bentuk reaksi terhadap keberlakuan peraturan yang dianggap tidak sesuai, pustakawan disisi lain menjadi oknum yang bertindak sebagai pelaku dari keberlakuan aturan tersebut sehingga bagaimana reaksi yang muncul juga tidak terlepas dari bagaimana peran pustakawan sebagai oknum pelaksana operasional perpustakaan (Momodu, 2014). Fenomena tersebut menunjukan bagaimana peraturan yang bertindak sebagai praktik kuasa perpustakaan dalam mendisiplinkan pemustaka perlu ditinjau kembali, begitupun juga dengan pustakawan yang bertindak sebagai oknum atau pelaku operasional perpustakaan.

Meskipun terdapat reaksi yang ditimbulkan akibat tidak adanya kesesuaian antara peraturan yang diberlakukan oleh perpustakaan terhadap penggunaanya, namun perpustakaan sebagai bentuk otoritas memiliki kuasa untuk menggiring pemustaka untuk dapat terdisiplinkan dengan pemberlakuan perpustakaan tersebut. Bentuk peraturan yang dikeluarkan dan diberlakukan oleh perpustakaan merupakan bentuk untuk mencapai standard yang ditetapkan oleh perpustakaan atau bisa dikatakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Oyieke, 2020). Maka dari itu meskipun reaksi dikeluarkan oleh pemustaka, namun secara dalam praktik kuasa apa yang dilakukan oleh pemustaka masih berada dibawah kendali perpustakaan dengan pustakawan sebagai pengendalinya. Hal ini tidak lain adalah karena dalam konteks hubungan kekuasaan dalam perpustakaan, pustakawan dikenal sebagai tokoh yang memiliki otoritas serta dikenal memiliki kapasitas yang lebih dibandingkan dengan penggunaanya seperti latar belakang Pendidikan, hak poreografif sebagai pengendali informasi, sampai dengan kephahaman lebih dalam konteks praktisi perpustakaan. Dibandingkan dengan pemustaka yang pada hubungan ini dikenal sebagai pihak yang awam dan tidak bisa disetarakan dengan pustakawan (Tuominen, 1997).

Mills dan Lodge dari Charles Sturt University, Australia mengemukakan dalam jurnalnya bahwa kuasa pustakawan dalam hak poreografif yang dimiliki tidak serta merta menjadikan pengguna sebagai pihak yang selalu ikut arus dalam kuasa yang dimainkan oleh otoritas perpustakaan. Pemustaka, terutama dengan latar belakang akademisi memiliki andil untuk memberikan evaluasi agar layanan yang diberikan lebih baik berdasarkan pada pengalaman dan kapasitas keilmuan yang telah dimilikinya (Mills & Lodge, 2006). Fenomena sebagai bukti adalah pada penelitian yang dilakukan pada pemustaka dari 7 perpustakaan yang ada di USA. Pengemukaan masukan sebagai bentuk evaluasi menjadi kritik bagi layanan perpustakaan maupun kinerja pustakawan sebagai pengelolanya yang masih dirasa memiliki celah untuk diperbaiki (Luo, 2014). Namun meskipun pemustaka memiliki hak tersebut, kesenjangan terdapat pada hak poreografif yang hanya dimiliki oleh pihak

perpustakaan yang dimana merupakan pustakawan sendiri yang dapat menentukan kebijakan untuk diberlakukan (Momodu, 2014).

Kesenjangan-kesenjangan yang terjadi pada perpustakaan menunjukkan bahwa layanan yang diberikan belum bisa memenuhi tuntutan untuk dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat baik secara historis maupun secara sosial (Pawley & Robbins, 2013). Perpustakaan sejatinya mampu untuk memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan keadaan masyarakat yang sangat beragam. Kesenjangan yang terjadi pada perpustakaan juga menjadi hambatan bagi pemustaka untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang kreatif (Boyle et al., 2016), dimana masyarakat dapat secara maksimal memanfaatkan layanan yang ditawarkan oleh perpustakaan untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Untuk itulah mengapa perpustakaan komunitas hadir sebagai alternatif untuk mengisi kesenjangan yang terdapat pada perpustakaan formal.

Seringkali ditemui pemrakarsa dalam perpustakaan komunitas merupakan para kaum muda yang memiliki ide segar dalam mengemas sistem perpustakaan yang ada. Hal ini mendorong suatu kelebihan bagi perpustakaan komunitas untuk dapat memainkan perannya sebagai suatu wadah referensi informasi dan pengetahuan ataupun sebagai wahana edukasi serta rekreasi bagi pemustakanya (Håklev, 2010a). Perpustakaan komunitas dapat dengan cerdas mengemas sebuah konsep perpustakaan yang sebelumnya dikenal sebagai sebuah tempat atau gedung yang berisi banyak bahan pustaka menjadi sebuah taman atau kebun baca yang memiliki daya tarik tersendiri bagi pemustaka. Selain itu, perpustakaan berbasis komunitas juga memiliki genre tersendiri sebagai salah satu komponen yang menjadi nilai lebih untuk menarik antusiasme pada masyarakat sebagai pemustaka yang memanfaatkan fasilitas yang ada. Selain daripada fasilitas dan layanan yang ditawarkan, perpustakaan komunitas juga mempunyai daya tarik tersendiri karena adanya kelonggaran dalam hal aturan yang diberlakukan.

Sebuah penelitian lain yang dilakukan oleh Yandini tahun 2019 pada komunitas perpustakaan di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa tanggapan dari pemustaka terhadap perpustakaan berbasis komunitas cenderung positif. Sebanyak 50% pemustaka sebagai responden memberikan sebuah pernyataan bahwa pelayanan terpercaya namun belum begitu akurat dalam memberikan pelayanan, 54% responden menyatakan bahwa pegiat komunitas sebagai pengelola dinilai cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan, serta 60 % pemustaka menilai pegiat perpustakaan berbasis komunitas melakukan pelayanan dengan ramah (Yandini, 2019). Penilaian yang diberikan oleh pemustaka sebagai pihak yang menikmati layanan perpustakaan terhitung positif untuk ukuran perpustakaan berbasis komunitas yang tidak memiliki ikatan aturan yang baku dari suatu instansi. Namun berdasarkan penelitian tersebut, masih ditemukan beberapa respon yang mengarah kepada hal yang bersifat negatif seperti 26% responden masih merasa bahwa koleksi yang terdapat pada perpustakaan belum dapat memenuhi kebutuhan pustakanya. Respon tersebut dapat menjadi acuan bagi perpustakaan komunitas dalam meningkatkan pelayanan yang ditawarkan kepada para pemustaka.

Sedikit bergeser ke Provinsi Jawa Tengah tepatnya di kota Semarang terdapat juga fenomena suatu keberhasilan perpustakaan komunitas dalam menarik atensi masyarakat terutama anak-anak. Sebanyak 71 % dari responden yang semuanya anak-anak menyatakan ketertarikan mereka untuk berkunjung dan memanfaatkan layanan perpustakaan komunitas karena pengaruh salah satu layanan perpustakaan yaitu program *story telling* (Fallis, 2013). Program ini menjadi strategi perpustakaan dalam menarik minat pemustakanya karena memang dalam segmentasi yang diusung, anak-anak merupakan sasaran utama dari layanan perpustakaan ini. Terlihat pada fenomena tersebut bahwasanya perpustakaan komunitas menjadi wujud perpustakaan yang mampu memahami situasi dan kondisi dari pemustakanya (Setyaningsih, 2021).

Fenomena lain dapat ditemui pada kehidupan di luar negeri dimana dalam penelitian McNicol menyebutkan bahwa perpustakaan komunitas mempunyai visi yang

bagus bagi masyarakat di daerah belahan Australia selatan, dimana pada praktiknya perpustakaan komunitas memiliki layanan yang mempunyai kegiatan antargenerasi dan pembelajaran seumur hidup dan penyediaan keterampilan informasi (Mcnicol, 2019). Selain itu, terdapat juga penelitian yang menyebutkan bahwa perpustakaan komunitas mempunyai andil yang lebih dalam membangkitkan kesejahteraan masyarakat di daerah negara terbelakang tepatnya pada negara Uganda (Dent, 2006). Perpustakaan komunitas di negara tersebut menjadi pelopor dari pemberantasan buta huruf yang masih menjadi masalah besar bagi masyarakat negara tersebut. Masih di Afrika, perpustakaan komunitas mendapatkan atensi yang lebih di masyarakat. sebab dalam menjaankan praktiknya, perpustakaan melibatkan masyarakat untuk ikut andil dalam program layanan yang ditawarkan (Stranger-Johannessen et al., 2015).

Berdirinya suatu perpustakaan berbasis komunitas di tengah-tengah masyarakat diharapkan menjadi suatu jawaban atas keresahan yang terdapat dalam masyarakat mengenai kebutuhan akan bahan pustaka yang belum dapat sepenuhnya direalisasikan oleh perpustakaan formal. berdasarkan pada data yang telah dijelaskan sebelumnya, respon yang cenderung baik dari masyarakat sebagai pemustaka merupakan representasi dari respon positif akan hadirnya perpustakaan komunitas di masyarakat. Selain dapat mendapatkan bahan pustaka yang belum bisa didapatkan pada layanan perpustakaan formal, pemustaka memungkinkan memiliki nilai kejenuhan yang rendah dikarenakan tidak adanya suatu aturan yang kaku sebagaimana diketahui sering terjadi pada perpustakaan formal, sehingga pemustaka bisa lebih menikmati proses pemanfaatan layanan perpustakaan berbasis komunitas (Dent, 2006).

Pada fenomena-fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat output positif yang diberikan oleh perpustakaan komunitas terhadap masyarakat mendorong masyarakat untuk dapat mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing individu. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan layanan perpustakaan komunitas sesuai dengan marwah perpustakaan sebagai ruang kreatif yang dimana perpustakaan berperan sebagai tempat pembelajaran informal bagi pemustakanya (Boyle et al., 2016). Selain itu, fakta bahwa layanan perpustakaan komunitas

mempengaruhi kesejahteraan para pemustakanya sejalan dengan peran perpustakaan sebagai *Makerspace*. Makna perpustakaan sebagai *Makerspace* dapat diartikan sebagai suatu ruang atau tempat dimana orang-orang dapat mengembangkan minat dan potensi yang dimiliki, untuk kedepannya bertujuan menumbuhkan ide-ide, realisasi proyek serta berbagi pengetahuan antar penggunanya (Fourie & Meyer, 2015). Pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan melalui akses perpustakaan akan berpengaruh pada kapasitas seseorang untuk menjadikan hidupnya menjadi lebih sejahtera.

Praktik perpustakaan komunitas tidak terlepas dari segala pro dan kontra yang ada. Disisi lain perpustakaan komunitas memiliki kelebihan dalam hal fleksibilitas cara kerja serta model perpustakaan yang diusung, terdapat pula hambatan yang terkadang tidak dapat dihindari oleh perpustakaan komunitas. Tanpa adanya suatu legalitas yang mengikat, rentan muncul suatu permasalahan yang menyangkut hukum. Salah satu kasus yang sempat menggemparkan publik adalah kasus penangkapan mahasiswa yang tergabung dalam Vespa Literasi di Kota Probolinggo. Menurut artikel pemberitaan pada www.cnnindonesia.com bahwa 2 orang mahasiswa yang tergabung dalam komunitas pegiat literasi (termasuk kedalam perpustakaan berbasis komunitas) membawa buku yang bertemakan komunisme yang sebelumnya digelar dan dipamerkan pada aksi lapak baca di Alun-alun Kraksaan, Probolinggo (CNN Indonesia, 2019). Penangkapan tersebut didasari atas adanya kewenangan dalam melakukan pelarangan peredaran buku tertentu pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 yang dilakukan oleh pihak berwajib. Dalam kasus ini terdapat beberapa pertentangan dari perpustakaan komunitas vespa literasi dan pihak berwajib. Disisi lain perpustakaan komunitas terkait merasa bahwa yang dilakukan merupakan suatu upaya dalam memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas sedangkan pihak berwajib sendiri merasa bahwa pihak berwajib hanya melakukan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Kasus ini secara nyata menunjukkan adanya kesenjangan pada hukum yang berlaku dan juga kurangnya sosialisasi mengenai

fenomena ini kepada masyarakat. Kasus pelarangan ini merupakan suatu evaluasi bagi pemerintah untuk kembali mengkaji peraturan yang berlaku serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai peredaran buku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia (Prasetyo, 2020).

Melihat segala fenomena yang terjadi, merupakan suatu dorongan bagi perpustakaan komunitas untuk dapat menjalankan praktiknya dengan sesuai agar dapat mencapai visi yang telah diusung oleh masing-masing perpustakaan komunitas. Adanya fenomena-fenomena tersebut mendorong minat peneliti untuk melakukan penelitian mengenai wacana layanan yang dilakukan oleh perpustakaan komunitas. Selain itu, Keunikan yang peneliti temukan pada perpustakaan komunitas melalui fenomena yang terjadi menarik minat peneliti untuk mengetahui lebih lanjut apakah praktik counter wacana yang dilakukan merupakan langkah solutif untuk mengentaskan kesenjangan yang dialami oleh masyarakat pada perpustakaan formal.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini menjawab celah yang rumpang serta permasalahan yang muncul akibat dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Agar dalam pembahasan tidak melebar, peneliti membuat batasan masalah dalam fokus penelitian yang diantaranya:

1. Bagaimana praktik layanan perpustakaan komunitas yang membentuk counter wacana bagi masyarakat?
2. Bagaimana tipologi wacana perpustakaan komunitas yang terbentuk dalam praktik counter wacana di masyarakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penyebaran counter wacana oleh perpustakaan berbasis komunitas yang menjadi dasar penelitian peneliti.

2. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tipologi perpustakaan berbasis komunitas sesuai dengan praktik counter wacana yang dilakukan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- Membuahkan kajian serta menambah khazanah pengetahuan baru mengenai praktik sosial yang termuat dalam wacana perpustakaan berbasis komunitas khususnya dalam bidang keilmuan informasi dan perpustakaan. Selain itu, penelitian menjadi saran untuk mengembangkan kajian layanan perpustakaan sebagai sebuah produk wacana.
- Mengembangkan serta melatih rasa peka mahasiswa dan kemampuan untuk berpikir kritis terhadap fenomena yang dikaji, terutama pada fenomena yang umum terjadi di sekitar lingkungan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Bagi Institusi Perpustakaan Formal, penelitian ini dapat dipertimbangkan sebagai kajian untuk melakukan evaluasi layanan serta mendorong institusi perpustakaan untuk lebih peka terhadap kondisi masyarakat sebagai pemustakanya. Selain itu, hasil dari penelitian dapat menjadi referensi bagi perpustakaan untuk menumbuhkan inovasi layanan baru.
- Bagi Perpustakaan Komunitas, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mendorong praktik layanan yang semakin inovatif serta dapat menjadi pembelajaran untuk dapat menerapkan praktik kuasa guna meraih atensi dan eksistensi di masyarakat, sehingga tujuan-tujuan yang telah menjadi bagian dari visi dan misi komunitas dapat terealisasi dengan baik

- Bagi Pembaca, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mendapatkan rujukan informasi baik dalam layanan perpustakaan formal maupun perpustakaan komunitas.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep wacana Foucault dan wacana layanan perpustakaan komunitas

Wacana dapat dipahami sebagai sebuah gagasan, ide, atau konsep yang diproduksi. Foucault mengatakan bahwasanya sebuah wacana dapat dideteksi pada gagasan yang dibentuk dalam suatu konteks yang dapat memberikan pengaruh terhadap cara berpikir dan bertindak (Foucault, 1970). Konsep wacana yang dibawa oleh Foucault ditemukan pada pengalaman pribadi yang ditemukan oleh individu, namun berhubungan dengan adanya praktik kuasa pada posisi subjek tertentu. Didalam konsep wacana yang dikemukakan oleh Foucault, terdapat adanya hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Kekuasaan yang dikemukakan Foucault tidak diartikan pada kepemilikan yang bermakna pada seseorang yang memiliki kuasa atas wilayah seperti negara atau daerah. Kuasa yang dikemukakan oleh Foucault merupakan praktik yang diterapkan pada ruang lingkup yang memiliki banyak posisi strategis saling berkaitan. Praktik kuasa yang dikemukakan oleh Foucault dapat dilihat sebagai suatu strategi kuasa yang didalamnya terdapat sistem dan regulasi pada manusia yang memiliki hubungan tertentu satu sama lain. Wacana dalam konsep Foucault dibentuk dengan adanya suatu kekuasaan yang memproduksi sebuah pengetahuan.

Foucault menjelaskan dalam buku *The History of Sexuality Volume 1* (Foucault, 1978) bahwa terdapat 5 proporsi cara untuk memandang kuasa yang diantaranya adalah:

1. Kuasaan tidak dapat dipahami dengan pengertian mendapatkan, meraih, menggunakan, ataupun membagikan yang berwujud suatu entitas yang dapat dipegang dan bahkan dapat terbatas masanya. Melainkan kekuasaan dipraktikan melalui tempat dari relasi berjalan.
2. Relasi kuasa tidak dipahami sebagai struktur hierarki yang terdapat pihak yang dikuasai serta menguasai.
3. Munculnya kekuasaan dari bawah, maksudnya adalah pembeda dua subjek oposisi (Binary Oppositions) karena kekuasaan yang berlaku meliputi keduanya
4. Relasi kuasa memiliki sifat intensional dan non-subjek, yang merujuk pada kenyataan dimana berdirinya suatu kuasa pasti juga akan terdapat anti-kuasa atau resisten. Resisten yang dimaksudkan tidak berada pada luar relasi melainkan didalamnya. Maka karena itu, berbeda dengan yang lain, Foucault melakukan penelitian tentang kuasa pada subjek yang lebih kecil yaitu individu personal.

Konsep wacana Foucault dibahas dalam teorinya tentang hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Sebelum Foucault berbicara langsung tentang masalah kekuasaan, Foucault berfokus pada sejarah pengetahuan. Foucault menganggap sejarah kognisi sebagai epistemologi, yang merupakan bentuk kognisi otoritatif pada titik waktu tertentu. Menurut Foucault, pada Eriyanto, setiap kekuasaan disusun, diamankan, & diwujudkan lewat pengetahuan & Pewacanaan tertentu. Pewacanaan tertentu membentuk kebenaran & pengetahuan yg mengakibatkan pengaruh kuasa. Episteme adalah bentuk pengetahuan yg sudah dimantapkan menjadi pemaknaan terhadap situasi yang berbeda dari yang lain. dalam waktu yang dimaksudkan, hal tersebut bisa jadi ditinjau menjadi disposisi pengetahuan yang spesial dalam masanya. Pemantapan pengetahuan melibatkan berlangsungnya operasi kuasa. Pemantapan tadi berlangsung dalam level diskursus atau wacana (Discourse).

Dalam bukunya *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writing* (Foucault, 1980), Foucault menjelaskan bahwa relasi kekuasaan tidaklah dapat terwujud bila tidak terdapat sirkulasi, akumulasi, produksi, dan fungsi wacana itu sendiri. Jika tidak ada proses ekonomi, tidak akan ada Relasi kuasa. Individu dalam hal ini adalah subjek sebenarnya tentang bagaimana relasi kekuasaan bekerja karena individu merupakan pemeran utama proses itu sendiri. Relasi kuasa yang berfungsi dengan menggunakan fungsi wacana sebagai kebenaran dengan menggunakan perangkat disiplin untuk menormalkan praktik sosial pada subjek. Praktek disiplin dilakukan sebagai alat kekuasaan terhadap tubuh target individu. Selain itu, Foucault juga percaya bahwa kekuasaan dijalankan dengan tujuan kolektif sosial melalui otoritas. Otoritas juga dikenal sebagai status mengemudi. Mencapai hubungan kekuasaan dalam model ini berarti mengatur, membentuk, dan membangun berbagai pilihan untuk tindakan orang lain.

Menurut Foucault, ciri utama wacana adalah kemampuannya menjadi seperangkat wacana yang berfungsi membentuk dan melestarikan relasi kuasa dalam masyarakat. Contoh yang diberikan Foucault meliputi konsep gila dan tidak gila, sehat dan sakit, benar dan salah. Dalam suatu masyarakat terdapat wacana yang berbeda-beda, ada yang mendominasi dan ada yang terpinggirkan. Wacana yang dominan adalah wacana yang dipilih dan didukung oleh otoritas. Seperti pidato anti komunis yang disampaikan oleh pemerintah Orde Baru. Sedangkan tuturan yang terpinggirkan adalah tuturan lain yang tidak didukung oleh kekuasaan, yang kemudian dipinggirkan atau didominasi (Eriyanto, 2008). Wacana dominan ini memiliki dua konsekuensi. Pertama, wacana arus utama memberikan arahan tentang bagaimana suatu objek dibaca dan dipahami. Bidang pandang yang lebih luas terhalang, karena memiliki opsi yang tersedia dan tidak perlu. Kedua, konstruk diskursif yang dibuat pada suatu objek tidak merepresentasikan kebenaran. Batas-batas yang dibuat tidak hanya membatasi visi seseorang, tetapi juga menyebabkan terpinggirkannya gagasan lain. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kenyataan bahwa munculnya suatu wacana dominan akan

menimbulkan konsekuensi yaitu akan muncul adalah dimana wacana yang terpinggirkan atau termajinalkan akan membentuk suatu gagasan sebagai wujud wacana yang menjadi alternatif atau tandingan dari wacana dominan seperti yang dikemukakan oleh Riggins dalam Mertens (Mertens, 2002).

Salah satu bentuk wacana yang termajinalkan dapat dilihat pada wacana yang digaungkan oleh kaum kulit hitam dalam melawan hegemoni kulit putih yang ada pada benua amerika. Wacana dominan menunjukkan adanya praktik kuasa oleh kulit putih ras eropa yang menyebabkan adanya diskriminasi terhadap kaum kulit hitam. Penggaungan wacana dominan yang dipegang oleh kalangan kulit putih menyebabkan adanya tekanan terhadap kaum kulit hitam sehingga memunculkan adanya gerakan untuk mengangkat eksistensi kaum mereka (Vereen et al., 2017). Maksud dari tekanan dalam konteks wacana secara implisit individu-individu yang berada didalam lingkarannya terhalangi untuk mengembangkan pengetahuan dan membatasi rasa kepercayaan terhadap wacana lain yang akan dikembangkan sehingga seakan-akan wacana dominan bersifat autokratis dan didaktif (Brookfield, 2001). Wacana yang diangkat oleh kelompok ras kulit hitam menunjukkan adanya wacana yang termajinalkan karena adanya wacana dominan oleh ras kulit putih. Secara tidak langsung, wacana yang dibawa oleh kaum kulit hitam merupakan suatu counter wacana (Counter-discouser) terhadap adanya dominasi wacana ras kulit putih. Adanya wacana tandingan tersebut memiliki tujuan untuk menghapuskan diskriminasi serta kesenjangan sosial yang dialami oleh kaum kulit putih.

Praktik wacana dapat dilihat pada studi kasus yang terdapat pada disiplin Ilmu Informasi dan Perpustakaan pada fenomena hadirnya perpustakaan di tengah kehidupan masyarakat. Wacana yang diangkat oleh perpustakaan formal atau perpustakaan yang dikenal secara umum oleh masyarakat berbentuk pada layanan yang diakses oleh pemustaka. wacana tersebut membentuk pengetahuan yang diproduksi oleh praktik kuasa sehingga mengakibatkan munculnya stigma masyarakat terhadap perpustakaan secara umum serta membentuk adanya rasionalitas sesuai dengan adanya

struktur diskursif dalam bentuk layanan yang umum diberikan oleh perpustakaan. Wacana yang terbentuk oleh perpustakaan tersebut tentunya berdasar dengan standard perpustakaan yang dikemukakan oleh Pawley dan Robbins dimana perpustakaan didirikan harus dapat memahami keadaan masyarakat sevara historis maupun sosialnya (Pawley & Robbins, 2013). Namun dalam praktiknya, masih ada beberapa kalangan yang merasakan kesenjangan dari layanan yang diberikan oleh perpustakaan sehingga mendorong terbentuknya perpustakaan berbasis komunitas.

Dorongan atas terbentuknya perpustakaan berbasis komunitas berangkat pada kesenjangan masyarakat dalam memanfaatkan perpustakaan formal baik itu dalam hal pencarian informasi, aksesibilitas, maupun pemanfaatan lain sebagai penunjang rutinitas kehidupan masyarakat (Mostert, 1998). Perpustakaan berbasis komunitas yang telah dikemukakan oleh Mostert diharapkan menjadi sebuah solusi bagi kesenjangan yang dialami oleh masyarakat. Hadirnya perpustakaan berbasis komunitas dipercaya sebagai suatu alternatif solusi dari kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh perpustakaan formal. dengan begitu, adanya perpustakaan berbasis komunitas dapat mengentaskan kesenjangan informasi yang menjadi dilema di masyarakat. Dipercaya untuk hadir sebagai sebuah solusi dari permasalahan tersebut, menjadi sebuah tuntutan bagi komunitas perpustakaan komunitas untuk benar-benar mengerti tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penggunaanya (Dent, 2006).

Dalam kasus fenomena munculnya perpustakaan komunitas ini merupakan gambaran dari munculnya suatu wacana yang termarjinalkan seperti apa yang dikatakan Foucault sebelumnya. Wacana yang dibawa oleh perpustakaan komunitas sesuai dengan konsep teori Foucault berusaha menjadi suatu counter-wacana melawan episteme masyarakat yang terbentuk dalam memandang perpustakaan sebagai sebuah objek yang hadir di masyarakat. Counter wacana yang dibawa oleh perpustakaan dengan basis komunitas disini diposisikan sebagai suatu alternatif bagi masyarakat dalam mengakses layanan perpustakaan. Tentunya perpbedaan layanan yang diberikan oleh perpustakaan komunitas dibandingkan dengan perpustakaan formal menjadi poros utama dalam praktiknya (Septiana, 2007). Dengan adanya praktik oleh perpustakaan

berbasis komunitas diharapkan menjadi suatu pandangan baru yang mampu menggeser episteme yang terbentuk oleh perpustakaan formal.

1.5.2 Wacana pada masyarakat postmodern

Post-modernisme dapat diartikan sebagai ide atau suatu gagasan baru yang memuat adanya penolakan terhadap paham modern yang terdapat pada masa sebelumnya. Postmodernisme mengangkat penawaran dengan ciri-ciri yang bertolak belakang dengan era sebelumnya. Lyotard mengartikan postmodernisme sebagai sebuah kritik terhadap pengetahuan yang bersifat universal yang terdapat pada pemikiran modernisme (Lyotard, 1984). Teori postmodernisme secara epistemologi dapat dipahami dengan tidak adanya kebenaran tunggal apalagi mutlak dalam paradigma ini. Berada pada masa post modern, sebuah objektivitas sangatlah dipertanyakan sebab bisa jadi objektivitas tersebut hanyalah sebuah subjektif besar yang membentuk wacana sehingga terlihat seakan-akan berbentuk sebuah objektif umum (Sugihartati, 2014). Karakteristik yang terdapat pada postmodernisme adalah kritik yang muncul akibat tidak terpenuhinya janji-janji dari modernisme, menolak apa yang dipandang oleh dunia, menolak kecenderungan modern yang terbatas pada disiplin budaya, kehidupan, fiksi, teori, image, dan dunia, penolakan terhadap gaya akademik modern yang harus teliti dan bernalar, tidak memfokuskan pengkajian pada inti dari masyarakat modern namun pada bagian tepinya.

Pada era postmodernisme, masyarakat modern mengalami peningkatan akselerasi yang luar biasa sehingga terjadi adanya hiperkomodifikasi, hiperdiferensiasi, hiperrasionalisasi, dan hiperindividualisasi sehingga membentuk masyarakat post-modern (Sugihartati, 2014). Hiperrasionalisasi dapat dilihat pada adanya keputusan politis dan upaya yang serius dengan semuanya didukung data yang akurat dalam melakukan prediksi dan antisipasi. Hiperkomodifikasi terlihat pada adanya perluasan hubungan komoditas melampaui segala hal yang bersifat tradisional sehingga menghapuskan status ranah-ranah yang tidak termodifikasi. Hiperdiferensiasi

ditandai dengan munculnya bidang yang multidisipliner, gaya hidup, multimedia dan sebagainya. Terakhir munculnya hiper-individualisasi mengakibatkan adanya pergeseran budaya dimana setiap orang mempunyai harapan untuk mampu menilai, memilih, serta membentuk tujuan hidup secara sadar.

Masyarakat pada era postmodernisme mengalami perubahan yang sangat signifikan, khususnya di bidang pengetahuan dan informasi. Ritzer dalam Rahma mengemukakan bahwa perubahan pada masyarakat menyebabkan realitas sosial yang bias, relatif, bahkan cenderung terlihat tidak ada. Selain itu, ruang dan waktu pada era postmodernisme akan terlihat pudar dan nisbi. Fenomena yang terjadi pada masyarakat efek yang sangat kacau sehingga mendekomposisi adanya modernitas yang sebelumnya ada (Sugihartati, 2014). Persepsi dalam masyarakat postmodern akan memilih suatu komoditas tertentu pada saat diantara beberapa referensi-referensi yang ada (Sastrawati, 2020). Lain halnya dengan pada masyarakat modern, nilai-nilai dan pengetahuan pada persepsi masyarakat postmodern menjadi tidak stabil. Masyarakat postmodern dalam persepsinya berfokus pada kesuksesan material, mengabaikan nilai-nilai utilitarian, dan sikap skeptis terhadap realitas sering berkembang menjadi nihilisme. Dunia berangsur-angsur mulai menyerupai kekacauan, di mana tidak ada pedoman moral dan nilai-nilai utama (Antonenko, et al., 2020).

Beberapa kasus mengatakan bahwa kehadiran postmodernisme membawa angin segar bagi masyarakat dalam menyelesaikan beberapa permasalahan. Contoh nyata dalam masyarakat adalah implementasi postmodernisme pada gaya arsitektur bangunan yang memiliki pengaruh besar terhadap masalah ketersediaan lahan di daerah perkotaan (Ilham, 2018). Dari salah satu contoh kasus tersebut, postmodern memiliki suatu pengaruh signifikan dalam kehidupan masyarakat. Memudarnya pemikiran modern atau pemikiran lama yang mendorong munculnya pemikiran baru memberikan adanya dampak positif dari hadirnya paradigma postmodernisme yang menggeser paradigma modern.

Keberadaan masyarakat postmodern di masa sekarang belum tentu dapat menjadi kelompok dominan di tengah-tengah masyarakat secara luas. Bagi beberapa

kalangan yang memiliki pemikiran posmodernisme namun menjadi kalangan yang terpinggirkan atau termajinalkan akan memebentuk suatu wacana sebagai bentuk implementasi pemikiran postmodern. Wacana tersebut dibentuk untuk sebuah perlawanan dan tandingan terhadap wacana dominan (Selby, 2007). Masyarakat postmodern menjadi komponen utama dalam terbentuknya suatu wacana termajinalkan oleh wacana dominan yang menjadi suatu episteme dalam masyarakat waktu ini. Wacana dominan yang menjadi lawan utama dari wacana termajinalkan masyarakat postmodern merupakan produk wacana yang diproduksi oleh para kalangan yang memiliki pemikiran modern dan masih diterima oleh masyarakat umum. Bentuk akibat dari produksi pemikiran modern tentu saja menjadi suatu alasan masyarakat postmodern menolak mengimani wacana dominan tersebut dan mendorong terbentuknya wacana termajinalkan yang berkembang menjadi sebuah counter-wacana melawan episteme yang telah tertanam dalam pandangan umum masyarakat (Norman, 1998).

Pada suatu waktu dalam kuliahnya, Foucault mengemukakan konsepnya yang sejalan dengan pemikiran postmodern. Konsep tersebut adalah Parrhesia yang mempunyai makna menyatakan suatu kebenaran. Secara penjabarannya seorang yang menganut parrhesia disebut sebagai parrhesiates yang dimana dalam praktiknya dia mengungkapkan apa yang dia tahu benar bahkan siap menerima resikonya untuk membenarkan suatu konteks kepada ketertiban (Foucault, 1983). Latar belakang genealogi dalam parrhesia menjelaskan bahwasanya sejarah atau masa lalu politik tidak serta merta muncul karena adanya suatu kasus pada negara atau wilayah, namun juga sebagai catatan yang lebih mendalam mengenai rumitnya hubungan antar kekuasaan, serta pengetahuan akan muncul lambat laun secara historis (Folkers, 2016). Pemikiran parrhesia juga bekerja untuk membenarkan apa yang pikiran, gagasan, pandangan oleh individu bersangkutan serta menyalahkan selain itu (Kebung, 2018)

Berada pada era masyarakat post-modern, membuahkan sebuah tuntutan baru bagi perpustakaan. Perpustakaan sebagai pusat Ilmu pengetahuan dan informasi wajib untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Karakteristik

masyarakat post-modern yang lebih mempercayai dan memilih suatu kenyataan berdasarkan data berdampak pada stigma umum bahwa tidak adanya kebenaran yang mutlak (Goulding, 2003). Maksud dari hal tersebut adalah dimana pengetahuan yang diimani oleh mayoritas orang tidak lagi sebagai suatu hal yang objektif, namun lebih dikatakan sebagai suatu hal yang subjektif. Setiap individu memiliki pemikiran yang heterogen satu sama lain, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya objektivitas dari setiap individu dalam masyarakat tanpa adanya pengaruh kuasa dari pihak tertentu. Dalam kasus ini perpustakaan memiliki tuntutan untuk dapat menerapkan layanan yang sesuai dengan kondisi masyarakat postmodern. Kunci utama dari kasus ini adalah dimana perpustakaan dapat memahami kebutuhan dan keinginan dengan masyarakat sebagai pemustaka baik secara sosial maupun historisnya (Pawley & Robbins, 2013).

Karakteristik lain yang dimiliki oleh masyarakat post-modern adalah adanya kemampuan untuk memanipulasi kesadaran tiap individu masing-masing. Manipulasi yang dimaksud adalah dimana orang-orang yang berada pada lingkup masyarakat post-modern tidak lagi memiliki tujuan masing-masing dalam menentukan sebuah pilihan dalam konteks apapun. Hampir bisa dikatakan tidak ada lagi individu memutuskan sebuah pilihan atas dasar pada persepsi masyarakat mayoritas, melainkan setiap individu memiliki tujuan dan rasionalitas atas dasar kepentingan individu masing-masing (Featherstone, 2007). Dampak dari adanya hal tersebut adalah dimana stigma umum tidak lagi berlaku pada kalangan masyarakat. Setiap dari masyarakatnya bergerak dan berperilaku dengan nalurinya sendiri dan sesuai dengan tujuan personal yang dimiliki.

Pemikiran umum masyarakat postmodern mengenai layanan perpustakaan formal yang telah menjalankan fungsinya sebagai tempat untuk mencari rujukan referensi yang lengkap dan kredibel kini tidak lagi dapat menjadi suatu pemikiran umum yang mutlak. Masyarakat sebagai pemustaka akan menelaah kembali apakah layanan perpustakaan formal yang ada sudah dapat memenuhi kebutuhan yang dimiliki pengguna dalam melakukan suatu upaya pemenuhan kebutuhan informasi. Adanya hal yang mendorong ketidak-puasan tersebut secara tidak langsung akan menumbuhkan

naluri individu untuk menemukan referensi lain yang sekiranya dapat digunakan untuk mencapai tujuan masing-masing.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian dengan judul “Perpustakaan Komunitas Sebagai Wacana Layanan Bagi Masyarakat Postmodern” yang penulis angkat menggunakan metode kualitatif dengan dengan metodologi analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis). Norman Fairclough menngemukakan bahwa penggunaan metode analisis wacana kritis, bertujuan untuk melihat suatu wacana yang berperan sebagai praktik sosial melalui penggunaan bahasa dalam tulisan dan tuturan (Fairclough, 1997). Metode ini memuat bagaimana cara menganalisis suatu hubungan produksi teks dalam skala mikro dengan fenomena sosial politik yang terdapat dalam skala makro masyarakat. Analisis wacana kritis Fairclough melihat bagaimana penggunaan makna bahasa sebagai operasi kekuasaan yang didalamnya terdapat suatu ideologi dan dikonstruksikan dengan wacana yang diproduksi. Penggunaan bahasa memiliki dampak dan konsekuensi yang besar secara tidak langsung, dalam artian bahasa yang digunakan merupakan suatu tindakan yang terencana dan tidak tiba-tiba namun memiliki karakteristik khusus yang berhubungan dengan kondisi masyarakat secara sosial, politik, dan budaya yang ada.

Dengan menggunakan basis bahasa sebagai produksi dari wacana, peneliti berusaha untuk menganalisis wacana yang diproduksi oleh perpustakaan komunitas baik dalam bentuk tulisan maupun tuturan sebagai bentuk layanan yang ditawarkan kepada masyarakat. Bahasa yang menjadi basis analisis dari peneliti secara kontekstual memiliki hubungan dengan adanya praktik sosial yang telah dilaksanakan dari waktu ke waktu.

1.6.1 Obyek Penelitian

Obyek yang dipilih pada penelitian ini merupakan perpustakaan berbasis komunitas yang tidak memiliki ikatan dengan suatu instansi pemerintahan tertentu. Alasan untuk memilih perpustakaan dengan tidak terikat pada suatu instansi karena perpustakaan berbasis komunitas secara independen memungkinkan untuk mempunyai layanan yang lebih variatif tanpa adanya suatu kekangan dari peraturan yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Terdapat 3 perpustakaan komunitas yang dipilih oleh peneliti sebagai objek dari penelitian yang telah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan keterjangkauan peneliti. Dari 3 perpustakaan komunitas ini, masing-masing mempunyai karakteristik model perpustakaan yang berbeda-beda. 3 perpustakaan komunitas yang dipilih tersebut diantaranya peneliti diantaranya:

1. Perpustakaan Lapak Baca Nyala Mojokerto
2. Perpustakaan Lingkaran Solidaritas
3. Perpustakaan Prasojo

Pemilihan Informan pada penelitian ini menggunakan metode purposive dengan adanya kriteria dalam penentuan informan (Sugiyono, 2016). Informan utama dalam penelitian ini adalah pemustaka atau pihak yang memanfaatkan layanan perpustakaan untuk menggali bagaimana pengalaman mereka dalam memanfaatkan layanan serta bentuk perilaku parrhesia yang seperti apa sehingga membentuk suatu pandangan baru yang menjadi wujud counter wacana. Adapun kriteria pemilihan informan adalah sebagai berikut:

- Pemustaka yang secara aktif memanfaatkan layanan perpustakaan komunitas
- Dapat menjangkau layanan yang diberikan oleh perpustakaan formal
- Memiliki pengalaman mengakses layanan yang dimiliki oleh perpustakaan formal

Dari kriteria yang telah ditentukan, informan mendapatkan setidaknya sebanyak 8 informan yang merupakan pemustaka dari 3 perpustakaan komunitas yang dipilih. Informan tersebut diantaranya:

Tabel 1.1 Nama pemustaka sebagai informan utama

NO	Tanggal Wawancara	Nama Informan	Perpustakaan komunitas yang menjadi rujukan
1	19/10/21	Safira	Perpustakaan Lingkaran Solidaritas
2	22/10/21	Dani	
3	15/11/21	Bobby	
4	16/11/21	Fendi	Perpustakaan prasojo
5	17/11/21	Yoga	
6	19/11/21	Antok	Perpustakaan Lapak Baca Nyala
7	24/11/21	Dion	
8	24/11/21	David	

Kemudian pustakawan atau pengelola perpustakaan komunitas dengan tujuan untuk menggali wacana seperti apa yang disebarkan serta melihat bagaimana praktik kuasa dijalankan dalam menyebarkan wacana tersebut. Kriteria untuk informan ini adalah merupakan pustakawan atau pengelola perpustakaan yang menjadi tonggak utama dalam menjalankan praktik perpustakaan komunitas. Adapun informan tersebut diantaranya adalah:

Tabel 1.2 Nama pustakawan perpustakaan komunitas sebagai informan

NO	Tanggal Wawancara	Nama Informan	Perpustakaan komunitas
1	19/11/2021	Daffa	Perpustakaan Lingkaran Solidaritas
2	8/11/2021	Yunas	Perpustakaan prasojo
3	3/10/2021	Andre	Perpustakaan Lapak Baca Nyala

Selain itu untuk mempermudah dalam mengidentifikasi wacana dalam layanan perpustakaan komunitas, pustakawan perpustakaan formal menjadi informan tambahan untuk mengetahui bagaimana perpustakaan memproduksi wacana dominan dalam praktik layanan yang ditawarkan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 2 informan yang merupakan pustakawan perpustakaan formal yang diantaranya adalah:

Tabel 1.3 Nama pustakawan perpustakaan formal sebagai informan

NO	Tanggal Wawancara	Nama Informan	Perpustakaan Formal
1	12/01/2022	IND	Perpustakaan Universitas Airlangga
2	13/01/2022	RUS	Perpustakaan Daerah Jawa Timur

1.6.2 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti disini adalah peneliti melakukan kegiatan wawancara yang ditujukan kepada informan yang merupakan orang yang terlibat langsung dalam proses produksi dari wacana perpustakaan komunitas. Kegiatan ini dilakukan guna mendapatkan informasi secara mendalam mengenai topik dan permasalahan dalam penelitiann. Penggunaan metode wawancara terhadap informan dengan melewati beberapa tahapan yang dimulai dengan pengenalan diri, penjelasan dari maksud kedatangan, penjelasan materi wawancara, serta mengajukan pertanyaan yang telah disusun agar efektifitas dicapai dalam wawancara (Sabari, 2010). Wawancara dilakukan dengan secara mendalam dengan menggali seorang informan dengan pertanyaan yang sesuai dengan konsep penelitian yang dibawakan atau yang disebut dengan *indepth interview* (Sugiyono, 2016). Wawancara ini dibawakan secara bebas namun tetap mengarah sehingga informan dengan leluasa akan menjawab dan informasi yang diperoleh secara mendalam. Wawancara yang dilakukan kepada informan bertujuan untuk menggali informasi dan data seputar perpustakaan berbasis komunitas sebagai counter wacana terhadap wacana

dominan yang dibawa oleh perpustakaan formal. Untuk memperkuat data yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti juga melakukan pencarian data melalui observasi pada literature-literatur yang mendukung informasi yang dibutuhkan.

1.6.3 Teknik Analisis data

Analisis wacana dalam bahasa secara detail perlu memperhatikan penggunaan bahasa dalam teks yang mengacu pada makna-makna tertentu. Dalam menggunakan metode analisis wacana kritis, terdapat 3 tahapan analisis data yang dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian (Haryatmoko, 2015). Tahapan tersebut diantaranya:

1. Deskripsi

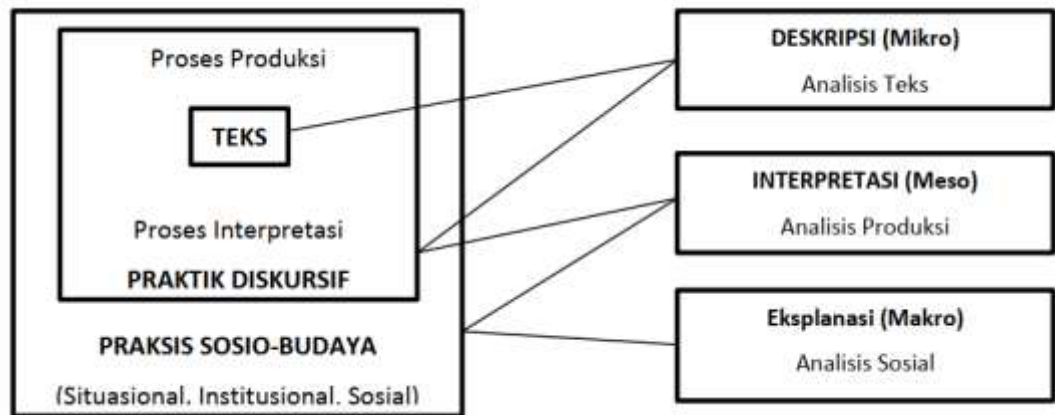
Pada tahapan ini, teks yang berisikan wacana dalam bentuk bahasa diuraikan secara deskriptif. Dalam melakukan tahapan ini, teks dielaskan tanpa perlu dihubungkan dengan aspek lain. Tajuk utama dalam teks akan dianalisis sesuai dengan isi dan bahasa yang termuat didalamnya.

2. Interpretasi.

Berbeda dengan tahapan sebelumnya, pada tahap ini teks tidak dianalisis secara deskriptif, namun dilakukan penafsiran dengan menarik hubungan dengan bagaimana praktik produksi teks yang dilakukan di setiap prosesnya.

3. Eksplanasi

Tahapan ini merupakan tahapan akhir yang memiliki tujuan untuk mencari makna atau penjelasan atas hasil penafsiran yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Penjelasan hasil penafsiran dapat ditemukan dengan cara menghubungkan produksi-produksi dengan praktik sosio-budaya ada pada lingkungan obyek penelitian.



Gambar 1.1 Dimensi Analisis Wacana Kritis (Haryatmoko, 2015)

1.7 Kerangka Berpikir

